

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- BKKBN. 2015. *Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Tahun 2015-2019*. BKKBN. Jakarta
- Hamidi, Jazim. 1999. *Penerapan asas-asas umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*. Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Hartini, Sri, Setiajeng Kadarsih, Tedi Sudrajat. 2010. *Hukum Kepegawaian Di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hartono, Sunaryati. 2006. *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Edisi Pertama*. Alumni. Bandung.
- HR, Ridwan. 2017. *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Huda, Ni'matul. 2013, *Otonomi Daerah: Filosofi, Sejarah Perkembangan dan Problematika*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Listiani, Vita. 2019, *Alih Kelola Penyuluh KB Dalam Kerangka Institusional: Studi Pada Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional*, Universitas Indonesia, Depok.
- Manan, Bagir. 1994, *Hubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Marbun, S.F. 2013, *Hukum Administrasi Negara II*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press (FH UII Press), Yogyakarta.
- Mochtar, Zainal Arifin, 2016, *Lembaga Negara Independen: Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca_Amandemen Konstitusi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Muslimin, Amrah. 1985. *Beberapa Asas dan Pengertian Pokok Tentang Administrasi dan Hukum Administrasi*. Alumni. Bandung.
- Nurcholis, Hanif. 2007, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, Gramedia Widiasarana, Jakarta.
- Ridwan, Juniarso & Ahmad Sodik Sudrajat. 2009. *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*. Nuansa, Bandung.

- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press. Jakarta.
- 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Subarsono, AG, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumardjono, Maria S.W. 1996. *Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Sebuah Panduan Dasar*. Gramedia. Jakarta.
- 2014. *Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*. Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Syaukani, HR, Afan Gaffar, M. Ryaas Rasyid. 2002, *Otonomi Daerah Dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Winarno, Budi. 2007, *Kebijakan Publik : Teori dan Proses*, Media Pressindo, Yogyakarta.

JURNAL

- Kurniawan, Ukik Kusuma, Hadi Pratomo dan Adang Bachtiar. “Kinerja Penyuluh Keluarga Berencana di Indonesia: Pedoman Pengujian Efektivitas Kinerja pada Era Desentralisasi”, *Jurnal Kesehatan Masyarakat Nasional*. Volume 5. Nomor 1. Agustus 2010.
- Listiani, Vita, 2019, “Alih Kelola Penyuluh KB Dalam Kerangka Institusional: Deskripsi Permasalahan Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah di BKKBN”, *Civil Service*, Volume 13, No.1. Juni 2019.

ARTIKEL/MATERI PRESENTASI

- Bappenas, 2017, Siaran Pers: Bonus Demografi 2030-2040 Strategi Indonesia Terkait ketenagakerjaan dan pendidikan. Bappenas. Jakarta.
- Listyawardani, Dwi. 2017. *Materi paparan Deputy Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi*. BKKBN. Jakarta.

INTERNET

- <https://news.detik.com/berita/d-4603088/gubernur-koster-minta-kepala-daerah-di-bali-setop-kampanye-kb-2-anak-cukup> , diakses 30 Agustus 2019.
- <https://www.liputan6.com/news/read/2173935/menengok-pengelolaan-tenaga-penyuluh-keluarga-berencana> , diakses 31 Agustus 2019.
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/capaian-kinerja-bkkbn-dalam-survei-kinerja-dan-akuntabilitas-program-kkbpk-2018> , diakses 16 Desember 2019.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601).

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Instruksi Presiden Nomor 15 Tahun 1983 Tentang Pedoman Pengawasan.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2018 tentang Jabatan Penyuluh Keluarga Berencana.

Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana.